



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Jabar Cabang Soreang Bandung

Bank Jabar demikian sebutan untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat milik Pemerintah Jawa Barat. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah RI no.33 tahun 1960 tentang peraturan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V Denis (De Earse Nederlandshe Indische) tertera ketentuan ini di nasionalisasi dan diserahkan kepada pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindaklanjut dari penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Barat mendirikan PT. Bank Karya Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar no.152 tanggal 21 Maret 1961 dan no.184 tanggal 13 Mei 1961. Untuk pertama kali modal dasarnya Rp. 2.500.000., berasal dari kas Pemerintah Daerah.

PT. Bank Karya Pembangunan kemudian di singkat dengan BKP, kemudian menjadi Perusahaan Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No.7/GKDH/BPD/1961 tanggal 20 Mei 1961. Untuk selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Daerah No.II/PD-DPRD/1972 tanggal 20 Juli 1972, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terhadap peraturan terhadap peraturan daerah yang merupakan landasan operasional dilakukan beberapa kali penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Daerah no.9 tahun 1996, modal dasar Bank Jabar ditentukan sebesar Rp. 250.000.000.000.,

Bank Jabar yang kantor pusatnya menempati gedung eksekutif N.V. Denis terletak di persimpangan Jalan Braga dan Jalan Naripan Bandung,

satu-satunya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh PJ. Presiden RI, waktu itu Bapak Ir. H. Djuanda Kartawijaya.

Aktivitas Bank Jabar sebagai Bank Umum sejak tahun 1992 statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan surat Keputusan Direksi BI No.28/48/KEP/DIR tanggal 22 November 1992. Di samping itu Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan (Call Name) "Bank Jabar" dari logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. II tahun 1995. Melalui Peraturan Daerah no.9 tahun 1996 tanggal 22 Juli 1996 modal dasar Bank Jabar kembali di tingkatkan dari Rp. 10.000.000., menjadi Rp. 250.000.000.000.,

Dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan perekonomian dan perbankan secara global serta mengantisipasi peningkatan usaha Bank Jabar di masa yang akan datang maka berdasarkan Peraturan Daerah no. 22 tahun 1998 dan Akta Pendirian Perusahaan no.4 tanggal 8 april 1999 berikut Akta Perbaikan Pendirian Perusahaan no.8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, maka bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat Jawa Barat yang agamis yang juga aktivitas bisnisnya biasa menerapkan sistem bagi hasil atau syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia no.2/18/DPG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar adalah Bank Pembangunan Daerah Pertama di Indonesia yang menjalankan dua sistem operasional bank yaitu melayani masyarakat dengan sistem konvensional (sistem bunga) dan dengan sistem syariah (bagi hasil).

2.2 Struktur Organisasi

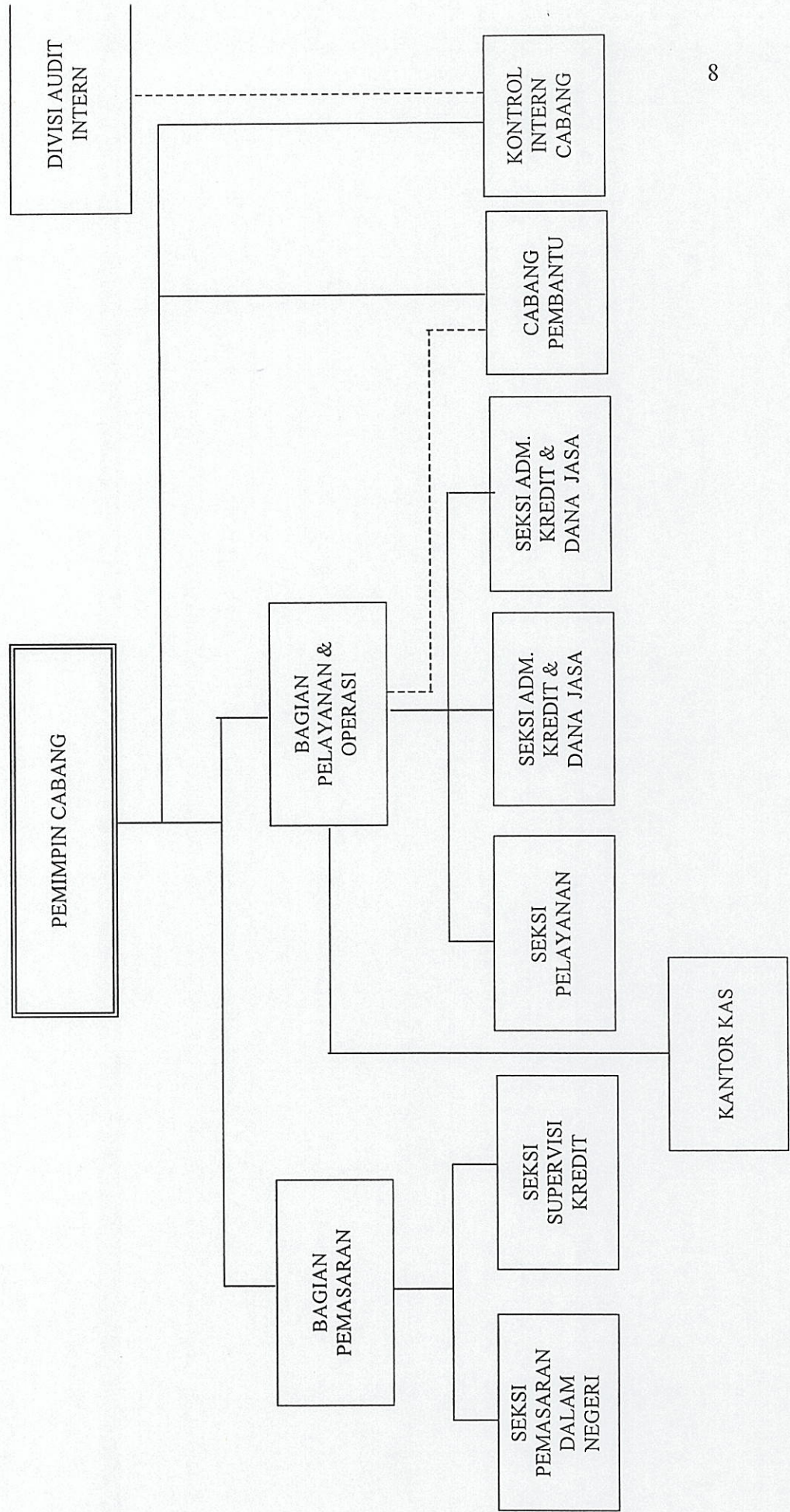
Keberadaan struktur organisasi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi maka kelangsungan kerja, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian ada dalam suatu organisasi baik itu para karyawan maupun pimpinan perusahaan dapat berkoordinasi dengan baik.

Bentuk organisasi pada PT. Bank Jabar Cabang Soreang Bandung ini berbentuk fungsional. Bentuk organisasi fungsional adalah sangat sederhana dan umum dipakai dan didalamnya terdapat garis komando dan garis koordinasi. Pemimpin Cabang dalam melaksanakan aktivitas kantornya dibantu oleh Bagian Pemasaran dan Bagian Pelayanan Operasional Bank.

Dengan memiliki struktur organisasi yang secara jelas sudah menunjukkan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan, masih dibutuhkan pula kemampuan Kontrol Intern Cabang didalam organisasi PT. Bank Jabar Cabang Soreang Bandung untuk mengarahkan dan mengendalikan agar dalam proses pencapaian tujuan perusahaan segala pekerjaan dapat terlaksana secara efisien.

Untuk lebih memperjelas, berikut ini penulis sajikan struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Jabar Cabang Soreang Bandung :

KANTOR CABANG KELAS 1 NON DEvisa



2.3 Deskripsi Jabatan (Job Description)

Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dengan mengisi serta membina sesuai dengan peraturan organisasi (Struktur Organisasi) yang ada dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi, umumnya setiap organisasi mengalami hambatan dalam menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan/bakatnya. Sesuai dengan ungkapan “ The Right Man on The Right Place”, maka paling tidak sebuah organisasi disertai deskripsi jabatan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka isi dari deskripsi jabatan adalah sebagai berikut :

- **Pemimpin Cabang**
 - a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi segala kegiatan personil dari unit kerja Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan mempertanggung-jawabkan langsung kepada Direksi.
 - b. Melaksanakan seluruh wewenang yang diberikan oleh Direksi sebagai wakil direksi pada tingkat Kantor Cabang.
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran, atas pencapaian sasaran dan akurasi dari laporan-laporan accounting internal maupun eksternal serta bertanggungjawab atas pencapaian target yang harus dicapai oleh Kantor Cabang.

- **Kepala Seksi Kredit**

Tugas-tugasnya adalah :

- a. Membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup kredit hingga terpeliharanya kelangsungan, kelancaran, dan

kesatuan gerak langkah pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku serta rencana kerja yang telah ditetapkan.

- b. Mengadakan evaluasi secara periodik terhadap peraturan perkreditan, ketentuan-ketentuan pengelolaan dan kerjasama sesuai dengan perkembangan bank dan ketentuan BI.
- c. Membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam lingkup operasional Bank Jabar Cabang Soreang.
- d. Mewakili Pimpinan Cabang untuk mengadakan hubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya.

- Kepala Seksi Keuangan

Kepala seksi keuangan tugas-tugasnya adalah :

- a. Menyiapkan data keuangan untuk pengusaha dana.
- b. Melaksanakan pengumpulan dana perusahaan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara finansil ekonomis dan mengatur penggunaan dan pengendaliannya.
- c. Mengatur penyimpanan uang dengan sebaik-baiknya.
- d. Mengatur likuiditas dan solvabilitas keuangan.
- e. Menyusun laporan periodik seksinya.

- Kepala Seksi Dana dan Jasa

Kepala seksi dana tugas-tugasnya adalah :

- a. Mengadakan pengawasan intern dari unit kerja tabungan dan deposito.
- b. Melaksanakan atau membantu tugas dan wewenang yang ada pada tabungan dan deposito sesuai dengan fungsi yang sudah diberikan.



- c. Bertanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan setiap hari dan mengamankan uang fisik maupun uang giral dalam batas-batas tertentu untuk kelancaran operasional sehubungan dengan likuiditasnya.
- Kepala Seksi Umum/ Personalia/ Akuntansi

Kepala Seksi Umum tugas-tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan administrasi serta realisasi program evaluasi hasil kerja pegawai berdasarkan penilaian yang disampaikan unit kerja yang membawahi pegawai yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan pembayaran-pembayaran atas biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional yang menjadi wewenang unit kerja personalia.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan dari pos-pos buku pedoman dari biro administrasi keuangan.
- Kepala Bagian Pelayanan (Customer Service)

Kepala bagian pelayanan tugas-tugasnya adalah :

- a. Membuat laporan secara periodik setiap tanggal 10, 20 dan akhir bulan ke PT. Telkom dan menyelesaikan transaksi pembayaran telepon, baik tunai maupun secara giral.
- b. Memberikan usulan rekomendasi kepada PT. Telkom tentang nomor-nomor telpon yang dicabut inventaris kantor.
- c. Bertanggung jawab atas pelayanan dan pembinaan nasabah dan bertanggung jawab pula atas peralatan inventaris kantor.

- Kantor Cabang Pembantu

- a. Memimpin kantor cabang.
- b. Membantu dan mengawasi semua pekerjaan administrasi serta laporan di lingkungan kantor cabang pembantu.
- c. Membina petugas di lingkungannya.
- d. Mengurus dan melaksanakan administrasi dan keuangan kantor cabang pembantu bersama-sama dengan pengawas lainnya.
- e. Memproses permohonan kredit.
- f. Membina dan menjalin hubungan dengan pihak luar.

- Bagian Kas Daerah

Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Melayani dan memproses pencairan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)
- b. Membuat jurnal transaksi kas daerah
- c. Membuat mutasi saldo kas daerah
- d. Menjurnal penerimaan pajak
- e. Memproses dan mengadministrasi pajak
- f. Membuat pencatatan ke dalam buku besar
- g. Memfile jurnal dan bukti-bukti transaksi
- h. Membuat laporan pajak penerimaan KPKN

2.4 Aspek Kegiatan Bank Cabang Soreang

Misi dan Fungsi

Bank Jabar didirikan dengan maksud melalui aktivitasnya membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat. Bank Jabar salah satu alat kelengkapan ekonomi daerah di bidang keuangan dan menjalankan usahanya sebagai bank. Sebagai alat kelengkapannya Bank Jabar mempunyai tugas antara lain:

- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah.
- b. Pemegang kas daerah dan melaksanakan penyimpanan uang di daerah.
- c. Salah satu sumber pendapatan daerah.

Adapun rencana pengembangan aspek-aspek penunjang operasional PT. Bank Jabar adalah sebagai berikut:

♦ Investasi

Investasi adalah pengembangan teknologi, perluasan jaringan kantor dan layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaannya yang didukung analisis cost and benefit. Pelaksanaan investasi disesuaikan dengan kemampuan pemupukan sumber dana investasi yang tersedia.

♦ Manajemen dan Kelembagaan

Pengembangan organisasi sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta melakukan evaluasi terhadap ketentuan dan peraturan agar dapat mengikuti perkembangan perekonomian, ketentuan pemerintah dibidang perbankan serta kebijakan Otonomi Daerah.

Perluasan jaringan kantor sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Payment Point dalam upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada nasabah.

Melaksanakan secara terus-menerus riset dan pengembangan terhadap seluruh bidang operasional yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen.

♦ Sumber Daya Manusia

Penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional melalui program recruitmen dan program pendidikan serta latihan yang bermutu dan tepat, penerapan Career Path Management serta Reward and Punishment.

♦ Kegiatan Lainnya

1. Pembinaan BPR Milik Daerah

Untuk memenuhi pelayanan jasa perbankan di pedesaan Jawa Barat telah didirikan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pendirian BKPD tersebut merupakan gagasan Bapak Mashudi yang direalisasikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat no.40/BI/Pem/SK/65 tanggal 21 Desember 1965. Jumlah BKPD yang dibentuk sebanyak 225 unit yang terbesar di Kecamatan-kecamatan pada 13 Kabupaten, dimana 217 unit mendapat izin usaha perbankan dari Menteri Keuangan.

Pembinaan terhadap BKPD dilakukan oleh Badan Pembina termasuk Bank Jabar sebagai anggota, untuk pemeriksaan intern BKPD di Kabupaten masing-masing ditangani oleh inspektur BKPD yang pejabatnya dari

Bank Jabar. Tugas tersebut berlangsung sehingga tahun 1973 dan selanjutnya diserahkan kepada Inspektur BKPD yang pejabatnya adalah Pemeritah Derah.

Sementara BKPD belum terbentuk diseluruh Kecamatan Jawa Barat, Mentri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran no.B.3331/NK/B/70 tentang larangan mendirikan Bank Desa yang baru, sedangkan eksistensi lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah.

Untuk keperluan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.4/26/UPPB/PPTR yang membolehkan pendirian Lembaga Keuangan Pedesaan dengan tidak menyebutkan nama Bank. Berpedoman pada surat dimaksud, dibentuklah Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) yaitu untuk wilayah Banten melalui Surat Keputusan Gubernur No.142/A.II/5/SK/1973 dan untuk wilayah lainnya melalui Surat Keputusan Gubernur No.446/A.III/SK 1973, sehingga terbentuk sebanyak 161 unit terbesar di Kecamatan –kecamatan di 18 Kabupaten.

Dalam upaya pengembangan BKPD/LPK, Bank Jabar sering kali mendapat kepercayaan menangani berbagai program dari Pemerintah yaitu Proyek Provincial of Area Development Program, Proyek Kredit Usaha Tani DAS citanduy, Financial Institution Development Project, Kredit Usaha Kecil, Kredit Dana Bergulir, Kredit Mikro termasuk pelatihan para pengelola BKPD/LPK.

Pengaturan LPK kerap kali terjadi perubahan, terkhir disempurnakan melalui Peraturan Daerah Propinsi no.25 tahun 2000 tanggal

13 Desember 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) yaitu mengatur 62 LPK yang menjadi BPR, dan 82 LPK lainnya.

Peranan Bank Jabar pada PD.PK adalah memberikan Penyertaan Modal kepada PD.BPR LPK sebesar 15 % bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi 35 % dan Pemerintah Kabupaten 50 %, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah lain dalam rangka mengoptimalkan fungsi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Modal Daerah.

Realisasi Penyertaan Modal kepada PD.BPR LPK sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp. 9,726 miliar, yaitu dari Pemerintah Propinsi Rp. 4,748 miliar (49%), Pemerintah Kabupaten Rp. 3,538 miliar (36%) dan Bank Jabar sebesar Rp. 1,440 miliar (15 %).

Dengan adanya 87 BPR di Jawa Barat terkena BBKU yaitu 3 (tiga) PT. BPR dan 84 PD. BPR eks BKPD/BPs, sesuai Keputusan Presiden no. 31/166/KEP/DIR, Bank Jabar mendapat kepercayaan sebagai Bank Pembayar atas Kewajiban 87 BPR-BBKU, yaitu yang telah dibayarkan dana talangan Pemerintah sekitar Rp. 37,8 miliar.

Tugas-tugas yang berhubungan antara Bank Jabar dengan BPR milik Daerah sejak pendiriannya terus berkelanjutan, hal tersebut telah memberikan pengalaman yang berharga khususnya dalam upaya membantu mewujudkan kemandirian usaha Lembaga Keuangan Pedesaan tersebut agar dapat mendorong pertumbuhan pembangunan daerah serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai penunjang pelaksanaan otonomi daerah.

2. Kegiatan Sosial

Setiap tahun Bank Jabar senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Sosial untuk mengurangi beban yang harus dipikul oleh masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan Sosial Bank Jabar dilakukan baik langsung maupun bekerjasama dengan Kumpulan Istri Bank Jabar (KIBAR) berupa pemberian bantuan kepada panti asuhan, panti jompo dan penbagian sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat yang kurang mampu pada waktu-waktu tertentu.

Selain itu pada tahun 2000 Bank Jabar telah membangun Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi dan pada Tahun 2001 di Kabupaten Pandeglan. Bank Jabar membangun kedua Sekolah Dasar tersebut untuk mengganti bangunan sekolah yang rusak akibat bencana alam.

